



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 224/02122008
HARI : SELASA
TANGGAL : 2 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Obama Umumkan Hillary Menteri Luar Negeri	3
	Indonesia-India: RI Berbelasungkawa atas Aksi Terorisme	3
	THAILAND: Demonstran Makin Memperkuat Pendudukan Bandara, @ 165 WNI Akan Segera Dievakuasi	4
	Indonesia Tawarkan Menjadi Lokasi ASEAN Summit	5
	Krisis Ekonomi Semakin Terasa, Pasar Saham di Eropa Jatuh Lagi	5
	RI akan Tandatangani Konvensi Senjata Munisi Curah	6
	Pertemuan Poznan Dimulai: Delegasi 190 Negara Bicarakan Perubahan Iklim	7
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Jangan Rusak Tatakrama Diplomasi Soal KTT ASEAN	7
	B. EKONOMI	
	Nilai Ekspor Turun Tajam	8
	DUKUNGAN DEvisa: Indonesia Bisa Gunakan Fasilitas ASEAN Plus Tiga	9
	Ekspor Belum Mengarah pada Diversifikasi	9
	INVESTASI SUMSEL: 7 Investor China Berminat Bangun Pabrik Etanol	10

	C. SOSBUD		
		Hak Cipta dan Paten Budaya Diatur dalam UU Baru	10
	D. HANKAM		
		KEAMANAN LAUT: Pembajakan Tidak Bakal Terjadi di Selat Malaka	11
	E. HUKUM		
		Pemerintah Ajukan Arbitrase NNT	12
	F. OLAHRAGA		--
	G. LINGKUNGAN HIDUP		
		HTI, Masa Depan Sektor Kehutanan	12
		Kehidupan Laut, Ditemukan, 5 Spesies Ikan Baru di Nusa Penida	12
	III. ARTIKEL		
		Ancaman Obama untuk Indonesia (Oleh Saidiman)	13
		Perubahan Iklim dan Absennya Kepemimpinan (Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMI)	14
		Indonesia needs to step up to the plate (by Bara Hasibuan)	15
	IV. LAIN-LAIN		--
	V. EDITORIAL		
		KTT ASEAN Terpaksa Ditunda	17
		Sour tasting 'tom yam'	17

Jakarta, 2 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Obama Umumkan Hillary Menteri Luar Negeri

Presiden terpilih Amerika Serikat Barack Obama kemarin (1/12) mengumumkan penunjukan Senator New York Hillary Rodham Clinton sebagai menteri luar negeri dan Robert Gates tetap sebagai Menteri Pertahanan.

Obama, yang akan menempati jabatannya mulai 20 Januari 2009, berjanji untuk lebih inklusif dan menyatakan dirinya memiliki visi memerbarui kepemimpinan Amerika di dunia setelah pemerintahan Presiden George W. Bush selama delapan tahun.

Pernyataan dari kantor Obama menyebutkan dia juga menunjuk Gubernur Arizona Janet Napolitano sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri, Eric Holder sebagai Jaksa Agung, Jenderal James Jones sebagai Penasihat Keamanan Nasional, dan penasihat lamanya Susan Rice sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Obama mengatakan dirinya akan menerapkan "kepemimpinan fajar baru Amerika" yang mengintegrasikan militer, diplomasi, penegakan hukum, dan ekonomi. "Tim yang kita susun hari ini secara unik cocok untuk melakukan hal itu," kata dia dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman tersebut menyusul keputusan Obama atas tim ekonominya minggu lalu, yang memasukkan Kepala Bank Sentral (Federal Reserve) Timothy Geiner sebagai Menteri Keuangan. Ini berarti Obama telah memutuskan 15 posisi atau sepertiga kabinetnya hanya dalam jangka waktu kurang dari sebulan setelah dia terpilih.

Namun, pengangkatan Hillary segera mengundang kritik. "Apa yang kita lihat sekarang adalah Barack Obama sekali lagi membawa kita kembali ke era 1990-an dimana orang-orangnya sekarang dulu berkuasa," kata Jeremy Scahill, pengamat politik dan pengarang buku *Blackwater*.

Hillary sendiri secara terpisah sempat menyatakan "bersemangat" memangku jabatan sebagai diplomat nomor satu Amerika.

Penunjukan Hillary menjadi transformasi dari persaingan politik pada masa pemilihan pendahuluan Demokrat menjadi kemitraan diplomatik dan strategis.

Untuk memuluskan langkah istrinya menuju jabatan baru sebagai menteri luar negeri, mantan Presiden Bill Clinton sepakat mengumumkan setiap nama kontributor yayasannya sejak didirikan pada 1997. Clinton akan menolak donasi dari pemerintah asing untuk Clinton Global Initiative (CGI) dalam konferensi amal tahunannya, selain menghentikan pertemuan CGI di luar negeri.

Pengumpulan dana global dan kesepakatan bisnis Bill Clinton semula dikhawatirkan dapat menghalangi langkah istrinya menjadi menteri luar negeri. Namun, dalam beberapa negosiasi dengan tim transisi Obama, Clinton menyepakati beberapa langkah yang didesain untuk menciptakan transparansi terhadap tugas yang diemban pascajabatannya sebagai presiden.

Sebelumnya, Bill Clinton menolak menyebutkan identitas kontributor dana yayasannya dengan alasan para kontributor tersebut bersedia memberikan uang selama identitas mereka tak disebutkan. (*Jurnal Nasional*)

2. Indonesia-India: RI Berbelasungkawa atas Aksi Terorisme

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan belasungkawa atas aksi terorisme di Mumbai, India, yang menelan korban ratusan jiwa. Presiden menyerukan pengukuhan kerja sama internasional memerangi terorisme.

"Harapan Indonesia, kerja sama internasional dapat lebih dikukuhkan untuk memerangi kekerasan dan aksi-aksi terorisme seperti terjadi di Mumbai," ujar Presiden ketika menerima kunjungan Presiden India Pratibha Devisingh Patil di Istana Merdeka, Senin (1/12).

Dalam jumpa pers bersama tanpa tanya jawab itu, Presiden Patil mengatakan, Indonesia dan India memiliki kemiripan dalam isu-isu keamanan yang dihadapi. "Kami juga menghadapi beberapa pihak yang tidak memedulikan hidup manusia dan masyarakat. Baru-baru ini India harus berperang melawan terorisme," ujar Presiden Patil yang mengawali pernyataannya dengan kata "selamat pagi" dan mengakhirinya dengan kata "semoga Tuhan memberkati dan terima kasih".

Sebelum jumpa pers, Presiden Patil disambut dalam upacara kenegaraan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Selesai pertemuan bilateral, ditandatangani nota kesepahaman (MOU) kerja sama di bidang kepemudaan, olahraga, dan pertanian.

Kemitraan strategis

India dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis kedua negara.

Di bidang perdagangan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerja samanya. Volume perdagangan 6,5 miliar dollar AS pada tahun 2006 akan ditingkatkan menjadi 10 miliar dollar AS pada tahun 2010.

Indonesia dan India juga sepakat mendorong pengusaha kedua negara untuk meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi. Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, farmasi, kepariwisataan, dan industri perfilman. (Kompas)

3. THAILAND: Demonstran Makin Memperkuat Pendudukan Bandara, @ 165 WNI Akan Segera Dievakuasi

Demonstran antipemerintah semakin memperkuat pendudukan mereka terhadap dua bandara di Bangkok, Senin, dengan memindahkan massa yang selama tiga bulan terakhir menguasai kantor Perdana Menteri Somchai Wongsawat.

Sehari sebelumnya, demonstran yang menduduki kantor pemerintah dilempari granat sehingga mencederai 51 orang. Sejak menduduki kantor itu pada 26 Agustus lalu, para demonstran acap diserang granat oleh orang tak dikenal.

Untuk menghindari korban lebih lanjut, pemimpin demonstran dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) Chamlong Srimuang memerintahkan massanya untuk meninggalkan kantor perdana menteri dan bergabung dengan demonstran yang menduduki Bandara Don Muang dan Suvarnabhumi.

Aksi pendudukan dua bandara di Bangkok ini merupakan tindakan paling berani dalam upaya untuk menggulingkan pemerintah. Massa PAD menolak kepemimpinan PM Somchai karena dituding merupakan kepanjangan tangan dari mantan PM Thaksin Shinawatra, yang kini mengasingkan diri di luar negeri.

Akibat pendudukan bandara, penerbangan dari dan ke Thailand terpaksa dibatalkan. Sebanyak 88 pesawat terperangkap di Bandara Suvarnabhumi sejak para demonstran menduduki terminal dan memaksanya tutup, Selasa lalu.

Juru bicara bandara itu mengatakan, dari 88 pesawat, 29 di antaranya milik perusahaan penerbangan nasional Thai Airways, 16 milik Thai AirAsia, dan 15 milik perusahaan penerbangan swasta Bangkok Airways. Sisa 28 pesawat adalah dari bermacam perusahaan penerbangan lain, 12 di antaranya milik perusahaan penerbangan dari negara asing.

Sebanyak 100.000 warga negara asing terperangkap di Thailand akibat aksi pendudukan tersebut. Sejauh ini jalan ke luar yang ada hanyalah melalui pangkalan angkatan laut era-Perang Vietnam, U-Tapao, yang berada 190 kilometer di sebelah tenggara Bangkok.

Polisi menyatakan, mereka sedang mengadakan perundingan dengan pemimpin demonstran, tapi juga telah mengeluarkan instruksi agar mereka meninggalkan bandara di bawah keadaan darurat yang diumumkan oleh Perdana Menteri Somchai Wongsawat pada pekan lalu.

Dari ratusan ribu warga negara asing yang terjebak di Thailand, tidak kurang dari 165 warga negara Indonesia (WNI) berada di sana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan para WNI itu akan segera dievakuasi pada Selasa (2/11) ini.

"Saya sudah melakukan pembicaraan dengan Menlu (Hassan Wirajuda) dan Dubes RI di Thailand (Mohammad Hatta). Mereka saat ini sedang dievakuasi untuk nantinya diterbangkan ke Indonesia," ujar SBY, dalam jumpa pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Pesawat Garuda Indonesia akan berangkat ke Thailand dan membawa pulang 165 WNI tersebut. "Sisanya diusahakan untuk bisa kembali dengan airlines yang lain, dengan demikian mereka bisa kembali ke Indonesia dengan selamat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan bahwa pemerintah Thailand kemungkinan akan mengumumkan kesiapan negaranya untuk menyelenggarakan pertemuan puncak ke-14 ASEAN pada Rabu (3/12).

"Menlu Thailand sudah membayangkan kemungkinan penundaan KTT ASEAN, tapi masih akan diputuskan pada sidang kabinet di Thailand dalam satu atau dua hari ini, kemungkinan hari Rabu (ada pengumuman)," kata Hassan.(Suara Karya)

4. Indonesia Tawarkan Menjadi Lokasi ASEAN Summit

Perkembangan situasi politik di Thailand terus bergejolak. Thailand pun terancam batal menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Summit) yang sedianya dilangsungkan 13-18 Desember di Chiang Mai, Thailand, seperti yang sebelumnya disampaikan oleh pemimpin ASEAN, Surin Pitsuwan, Minggu lalu.

Menanggapi kemungkinan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menawarkan Indonesia untuk menjadi lokasi pelaksanaan pertemuan penting bagi negara-negara ASEAN itu.

Pernyataan itu disampaikan Presiden, sesuai bertemu Presiden India Pratibha Devisingh Patil, yang tengah melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia.

"Saya harap acara itu masih bisa diselenggarakan di Thailand. Namun jika belum memungkinkan, Indonesia dan Sekjen ASEAN menawarkan agar acara ini bisa dilaksanakan di kantor Sekjen ASEAN yang kebetulan tempatnya di Jakarta," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Meski demikian, tidak berarti Indonesia kemudian menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Seperti yang disampaikan Presiden, kepanitiaan tetap dipegang oleh Thailand. Sebagai lokasi penyelenggaraan, Presiden juga menawarkan Bali sebagai lokasi utama.

"Saat ini Indonesia dan para pemimpin negara ASEAN, termasuk Thailand, tengah mengomunikasikan tawaran tersebut," kata Presiden yang didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Sementara itu, terkait masalah politik di Thailand, Presiden percaya Pemerintah Thailand mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik. Karena bagaimanapun, demokrasi harus bisa ditegakkan di Asia terutama di negara-negara ASEAN termasuk Thailand. Dalam pertemuan ASEAN Summit dan ASEAN+3 itu rencananya akan diresmikan piagam ASEAN yang baru. Selain itu juga akan dirumuskan langkah-langkah terbaik yang bisa diambil oleh negara-negara ASEAN untuk mengatasi krisis global.

Presiden juga menyingung masalah sejumlah warga negara Indonesia di Thailand yang saat ini belum juga tiba di Tanah Air. Dari 320 WNI yang terdata, seperti yang disampaikan Presiden sebanyak 110 orang telah tiba di Indonesia.

Sementara sisanya sebesar 210 orang, menurut laporan Duta Besar Indonesia di Thailand, Muhammad Hatta, kini sedang dipersiapkan untuk diterbangkan kembali ke Indonesia.

"Saat ini sedang dinegosiasikan dengan Pemerintah Thailand, namun besok pesawat Garuda akan terbang menuju Thailand untuk membawa kembali setidaknya 165 WNI yang telah memiliki tiket. Sisanya sedang diusahakan," kata Presiden.(Jurnal Nasional)

5. Krisis Ekonomi Semakin Terasa, Pasar Saham di Eropa Jatuh Lagi

Data perekonomian di beberapa negara yang diumumkan awal pekan ini menunjukkan keadaan memburuk. Aktivitas industri di Eropa dan China menurun pada bulan November. Sementara pejabat Jepang menyatakan perekonomian melambat drastis.

Warga yang biasanya gemar berbelanja sudah tidak lagi berbelanja, demikian terlihat dari penjualan ritel yang menurun drastis.

Gubernur Bank of Japan Masaaki Shirakawa, Senin (1/12) di Tokyo, memperingatkan bahwa kegiatan perekonomian menurun drastis. Perusahaan-perusahaan Jepang semakin sulit mendapatkan kredit. Bank sentral Jepang juga tengah mempersiapkan langkah-langkah baru untuk mengatasi krisis kredit. Para pejabat juga sudah memperingatkan, perekonomian dapat saja kembali memasuki deflasi tahun depan.

"Kelesuan aktivitas ekonomi berlangsung cepat. Perekonomian dunia juga mengalami perubahan dahsyat," ujar Shirakawa dalam pidatonya.

Menurunnya perekonomian global berdampak buruk bagi produsen mobil di Jepang. Angka penjualan mobil baru turun 27,3 persen pada November menjadi 215.783 unit, angka terendah sejak tahun 1969.

Dari Seoul diberitakan, ekspor Korea Selatan anjlok 18,3 persen pada November 2008 dari ekspor Oktober. Penurunan bulanan ini merupakan yang terburuk dalam tujuh tahun terakhir. Perusahaan otomotif Korsel juga bergegas mengurangi produksi karena permintaan global menurun.

Sektor manufaktur anjlok

Aktivitas sektor manufaktur di zona Euro turun mencapai titik terendah pada November lalu dan diperkirakan masih terus melemah. Indeks pembelian yang mengukur order baru di zona Eropa untuk manufaktur turun menjadi 35,6 poin. Angka indeks di bawah 50 menandakan perekonomian sedang jatuh. Ini merupakan keadaan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam 11 tahun terakhir.

"Hasil survei pembelian pada sektor manufaktur di bulan November yang sangat lemah menunjukkan bahwa resesi di zona Euro akan semakin dalam," kata Howard Archer, ekonom pada IHS Global Insight.

Pekan ini diperkirakan Bank of England serta bank sentral Eropa, Australia, dan Selandia Baru akan kembali menurunkan tingkat suku bunga mereka.

Pemutusan hubungan kerja juga semakin banyak terjadi. Bank Jerman, BayernLB, akan mengurangi seperempat dari jumlah tenaga kerjanya atau sekitar 5.600 orang hingga tahun 2013. Sebagian besar pengurangan akan dilakukan di cabang Asia.

Seperti juga di Eropa, aktivitas sektor manufaktur China juga menurun drastis sepanjang November. Pemutusan hubungan kerja juga sudah terjadi di banyak pabrik di negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia ini.

Presiden China Hu Jintao mengatakan kepada para petinggi Partai Komunis China bahwa China akan kehilangan daya saingnya dan memperingatkan, mengatasi krisis saat ini merupakan ujian bagi Partai Komunis.

Seruan PBB

Dalam laporannya yang diterbitkan Senin, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan perlunya sebuah stimulus besar-besaran dan saling terkait untuk dilakukan segera. Hal itu bertujuan mengatasi keadaan ekonomi global seperti sekarang ini.

Kajian "Situasi Ekonomi Dunia dan Prospek 2009" dipresentasikan pada konferensi internasional keuangan di Doha.

Paket stimulus itu harus didasarkan pada langkah yang memperbanyak likuiditas dan rekapitalisasi perbankan. Para ekonom dari PBB juga mengusulkan agar ada regulasi pada pasar dan institusi keuangan, dilakukannya penyediaan likuiditas global yang mencukupi, serta perbaikan sistem cadangan devisa internasional.

Secara umum, laporan itu memperkirakan ada penurunan pendapatan per kapita pada tahun 2009 di negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi global tidak lebih dari 1 persen pada tahun 2009 dibandingkan dengan 2,5 persen pada tahun 2008.

Keluarnya data perekonomian yang memburuk pada awal pekan ini mengakhiri kenaikan harga di pasar saham yang sudah terjadi selama enam hari berturut-turut.

Indeks FTSE 100 (London) anjlok 106,42 poin menjadi 4.181,59 dan indeks DAX (Jerman) anjlok 163,83 poin menjadi 4.505,61 poin. Indeks CAC-40 (Paris) anjlok 93,66 poin menjadi 3.169,02 poin pada perdagangan Senin.

"Pertanyaan sekarang ini yang krusial bukan lagi apakah resesi ekonomi global sudah dimulai, tetapi berapa lama hal ini akan terjadi," demikian pernyataan Bank of America yang ditujukan kepada relasinya. (Kompas)

6. RI akan Tandatangani Konvensi Senjata Munisi Curah

Pemerintah Indonesia akan menandatangani Konvensi Senjata Munisi Curah (*Convention on Cluster Munitions/CCM*) dalam Konferensi CCM di Oslo, Norwegia 1-4 Desember 2008, guna mendukung perdamaian dunia.

Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono dari Oslo, melalui layanan pesan singkat, Selasa (2/12) mengatakan, Indonesia seperti halnya negara lain sangat berkepentingan untuk meratifikasi CCM.

"RI berkepentingan memajukan perdamaian dunia. Dan kita dapat menjadi korban bahaya bom curah, seperti pasukan Garuda di Lebanon Selatan yang harus menghadapi bahaya bom curah buatan Israel utamanya di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel," katanya.

Penandatanganan CCM diprakasai melalui konferensi regional pertama CCM di Sofia, dimana 42 negara Afrika serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kemanusiaan dunia seperti Palang Merah Internasional (ICRC) kala itu sepakat untuk menggelar diskusi tentang dampak senjata munisi curah bagi kemanusiaan dan perdamaian dunia, di kota Kampala, Uganda pada 29-30 September 2008.

Diskusi di Kampala yang menghasilkan *Kampalan Action Plan* itu akan ditandatangani dan diratifikasi oleh sejumlah negara dalam pertemuan di Oslo, Norwegia yang dihadiri 90 negara.

Penandatanganan CCM akan dilaksanakan pada 3 Desember 2008 dan dengan penandatanganan serta ratifikasi oleh negara pihak maka diharapkan perdamaian dunia akan semakin terwujud. (Media Indonesia)

7. Pertemuan Poznan Dimulai: Delegasi 190 Negara Bicarakan Perubahan Iklim

Pertemuan para pihak ke-14 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim dibuka secara resmi di Poznan, Polandia, Senin (1/12). Selama dua pekan, ribuan delegasi dari 190 negara membahas penanganan perubahan iklim di tengah suasana krisis global.

Pada pembukaannya, Sekretaris Jenderal Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Yvo de Boer kembali mengingatkan, dunia harus bergerak cepat menekan laju pemanasan global. Sejauh ini, sebanyak 37 negara maju diwajibkan mengurangi emisi karbonnya, hingga rata-rata 5 persen dari kondisi tahun 1990, pada tahun 2012.

Ketua Panel Ahli Antarnegara untuk Perubahan Iklim (IPCC) Rajendra Pachauri mengingatkan konsekuensi dari kegagalan menangani perubahan iklim. Kesimpulan ribuan ahli menyebutkan, sepertiga spesies di Bumi menghadapi kepunahan, bongkahan es di kutub akan meleleh dan menaikkan permukaan laut hingga hitungan meter, serta ancaman krisis air bersih di sejumlah negara. "Itu bisa terjadi dalam beberapa dekade saja," kata Pachauri, seperti dilaporkan Kantor Berita Associated Press, kemarin.

Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah keberadaan proyek-proyek "energi hijau" menurun drastis seiring krisis keuangan global, yang juga menghantam sektor perkreditan.

Komitmen Eropa

Meskipun seluruh dunia berkonsentrasi pada persoalan penanganan krisis di negaranya masing-masing, negara-negara di Eropa menyatakan komitmennya. "Krisis finansial terjadi pada masa lalu dan juga pada masa datang, tetapi upaya kita di bidang lingkungan harus sepanjang masa," kata Perdana Menteri Polandia Donald Tusk.

Polandia akan mengambil alih posisi pimpinan negosiasi penanganan perubahan iklim sejak konferensi dibuka resmi. Pimpinan sebelumnya dipegang Indonesia, selaku tuan rumah COP ke-13 tahun 2007.

Posisi Polandia sulit. Pertumbuhan ekonominya bergantung pada batu bara, yang dikenal produk beremisi karbon tinggi.

Sebanyak 93 persen pembangkit energi di Polandia pun digerakkan batu bara. Sementara itu, Uni Eropa sepakat memotong emisi karbonnya hingga 20 persen tahun 2020.

Di tengah tarik-menarik kepentingan, harapan muncul dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat. Obama diyakini bisa mendorong pembicaraan penanganan perubahan iklim karena posisinya yang dikenal prolingkungan. (Kompas)

I | | .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Jangan Rusak Tatakrama Diplomasi Soal KTT ASEAN

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, di Jakarta, Senin (1/12), mengingatkan, agar Pemerintah RI jangan merusak tatakrama diplomasi internasional, sehubungan dengan upaya memindahkan tempat penyelenggaraan KTT ASEAN dari Thailand ke Indonesia.

"Beda situasinya kalau Pemerintah Thailand sudah menyatakan tak sanggup, barulah kita menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah," katanya menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar KTT ASEAN itu dipindahkan saja ke Indonesia.

Cara ini, menurut Andreas Pareira lagi, betul-betul bisa melukai hati Thailand sebagai sesama anggota ASEAN yang kini tengah menghadapi masalah internal. Sebaiknya Presiden Yudhoyono ialah, mengimbau masyarakat dan Pemerintah Thailand untuk memulihkan situasi, dan secepatnya terjadi rekonsiliasi nasional di sana, ujarnya lagi.

Sehingga, lanjutnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini juga bisa menjadi momentum pemulihan situasi politik di sana. "Jadi, jangan malah memanfaatkan situasi politik di Thailand untuk memindahkan KTT ASEAN dari Bangkok ke Jakarta, yang nota bene terkesan dipakai untuk kepentingan kampanye menuju Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2009," tandas Andreas Pareira lagi.

Sebagaimana diberitakan berbagai media, selang sepekan terakhir, situasi politik di Thailand semakin tak menentu, karena terjadinya demo massal oleh pihak penentang dan pro kepemimpinan pemerintahan yang berkuasa. (Media Indonesia)

B. EKONOMI

1. Nilai Ekspor Turun Tajam

Nilai ekspor Oktober dibandingkan bulan sebelumnya turun tajam 11,61%. Ekspor migas dan nonmigas masing-masing turun 25,7% dan 8,1%.

Penurunan ekspor cukup tajam. Jadi sekarang beritanya ekspor menurun, kalau kemarin kan baru akan turun," kata Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan di Jakarta kemarin. Total ekspor Oktober 2008 tercatat sebesar USD10,81 miliar, terdiri atas nonmigas USD9 miliar dan migas USD1,81 miliar. Secara total, nilai ekspor pada 12 negara tujuan utama minus USD580 juta, dibandingkan perolehan September 2008. Dengan pencapaian ini, kumulatif ekspor tahun ini sampai Oktober mencapai USD118,43 miliar, atau masih tumbuh 8,22%.

Sementara ekspor pada Oktober 2008 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya hanya naik 4,9%. Penurunan ekspor terutama dipicu turunnya ekspor ke Amerika Serikat (AS) sebesar USD304,7 juta, Korea Selatan USD163 juta, China USD184,4 juta, dan kelompok negara anggota ASEAN yang turun USD101 juta. "Jepang yang masih stabil, nilainya positif. Tetapi dengan resesi di sana, barangkali November dan Desember akan terasa dampaknya," ujar Rusman.

Berdasarkan hal itu, Rusman menilai kebijakan diversifikasi ekspor nonmigas oleh pemerintah belum tampak membuahkan hasil. Catatan arus perdagangan ke negara tujuan masih memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. "Kalau tidak segera diubah, nasib ekspor kita akan tergantung dengan perekonomian Amerika," imbuhs Rusman. Rusman mengatakan, baik rata-rata volume ekspor dari Indonesia maupun harga di pasar internasional samasama anjlok, sehingga penurunan nilai ekspor yang terjadi cukup besar.

Volume ekspor barang nonmigas pada Oktober terhadap September 2009 tercatat turun 6,01%, sementara harga komoditas rata-rata turun 10–20%. "Ini umumnya dialami oleh komoditas ekspor yang primer," jelasnya. Beberapa barang yang volume ekspornya turun antara lain bubur kertas sebesar 59%, karet dan barang dari karet 15%, tembaga 9%, besi baja 39%, kopi dan teh 31%, kakao 13,1%.

Adapun volume minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya naik 5% setelah pungutan ekspor diturunkan. Namun, nilai ekspornya tetap turun 5,6%, karena harga CPO dunia turun. "Nilainya turun dari USD1,34 miliar menjadi USD1,26 miliar," kata Rusman. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi memperkirakan kinerja ekspor nasional akan lebih memburuk pada November. Terlebih, kinerja barang ekspor andalan, seperti produk sektor perkebunan dan energi, semakin lesu.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Ketut Suardhana mengatakan, perlambatan ekspor nonmigas, terutama komoditas primer, telah dirasakan sejak September 2008. "Komoditas seperti cokelat atau kopi menurun karena permintaan global juga turun," ujarnya. Perlambatan kinerja ekspor, menurut Ketut, akan terus terjadi sampai krisis di negara-negara tujuan ekspor utama selesai. "Apabila krisis di AS dan Eropa diperkirakan akan selesai dalam 18 bulan, mungkin ekspor Indonesia baru bisa pulih setelah itu," tuturnya.

Lebih lanjut Rusman mengatakan, penurunan tajam ekspor juga diikuti turunnya impor yang pada Oktober tercatat turun 5,3%. Nilainya sebesar USD10,61 miliar sehingga neraca perdagangan pada Oktober masih surplus sekitar USD200 juta. "Tapi apabila pola ini berlanjut pada ekspor-

impor November dan Desember, neraca perdagangan bisa mengalami defisit,"ungkap Rusman. (Koran Sindo)

2. DUKUNGAN DEVISA: Indonesia Bisa Gunakan Fasilitas ASEAN Plus Tiga

Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas likuiditas dari Asean+3 dalam kerangka Chiangmai Initiative untuk dukungan cadangan devisa maupun pembiayaan defisit APBN 2009 dari Jepang.

"Fasilitas untuk mendukung dari sisi bujet defisit nanti akan dilakukan melalui JICA, sedangkan yang berhubungan dengan Chiangmai Initiative dan likuiditas melalui JBIC," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Senin.

Menurut Menkeu, pertemuan menkeu Asean+3 baru-baru ini membahas lebih detail Chiangmai Initiative dalam kondisi krisis global saat ini.

"Di Jepang kita membahas sampai kepada detail hal-hal apa yang harus dipenuhi dalam menggunakan fasilitas Chiangmai itu bagi negara-negara di Asean dan Asean plus," katanya.

Dapat Dukungan

Khusus Indonesia, lanjut Menkeu, bisa mendapatkan dukungan bagi pembiayaan defisit tahun 2009 seandainya situasi pasar surat berharga belum pulih.

"Seandainya situasi pasar surat berharga belum pulih maka untuk defisit financing kita bisa harapkan pinjaman bilateral, terutama dari Jepang," katanya.

Menurut dia, pemerintah Jepang memberikan tanggapan positif dan akan segera melakukan proses politik untuk maksud itu.

Ketika ditanya apakah Jepang akan memberikan standby loan (pinjaman siaga), Menkeu mengatakan akan diatur lagi dari sisi jumlah maupun kombinasinya dengan pinjaman lainnya. "Akan kita atur dari sisi jumlah dan nanti akan dikombinasikan antara multilateral dan bilateral lainnya," kata Menkeu. (Suara Karya)

3. Ekspor Belum Mengarah pada Diversifikasi

Ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer. Ini membuat pencapaian nilai ekspor rentan terhadap fluktuasi harga di pasar. Selain itu, kinerja ekspor Indonesia belum mengarah pada diversifikasi pasar dan produk.

Setelah terus meningkat sejak awal tahun hingga September 2008, seperti telah diperkirakan nilai ekspor Oktober mulai merosot akibat anjloknya harga komoditas dan melemahnya pasar Amerika Serikat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, Senin (1/12) di Jakarta, mengatakan, total nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2008 sebesar 10,8 miliar dollar AS, atau turun 11,6 persen dibandingkan September.

Secara kumulatif, nilai ekspor Januari-Oktober 2008 mencapai 118,43 miliar dollar AS, atau tumbuh 26,9 persen.

Pada produk nonmigas, penurunan nilai ekspor yang tajam selama Oktober antara lain terjadi pada karet, bubur kayu, tembaga, besi, dan baja. Nilai ekspor bubur kayu (pulp), misalnya, anjlok 61,6 persen dari 215,7 juta dollar AS pada September 2008 menjadi 82,7 juta dollar AS pada bulan Oktober.

Anjloknya nilai ekspor pulp dipengaruhi oleh turunnya volume ekspor hingga 58,5 persen pada Oktober dibandingkan dengan September. Di luar produk primer dan setengah jadi, penurunan nilai ekspor yang tajam juga terjadi pada garmen.

Data BPS menunjukkan, pada Oktober, penurunan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada tujuan pasar AS, China, dan Korsel.

"Perlunya diversifikasi pasar dan produk ekspor sudah disebut-sebut sejak 2007. Namun, kalau dilihat dari data BPS, sampai saat ini belum terjadi diversifikasi itu," ujar Rusman.

Ekonom Senior Indef, Fadhil Hasan, mengemukakan, diversifikasi pasar dan produk ekspor adalah langkah mendesak untuk mengurangi tekanan krisis global.

Ia mengingatkan, diversifikasi negara tujuan ekspor dari pasar tradisional, seperti AS dan Eropa, ke negara-negara yang perekonomiannya masih tumbuh mesti dibarengi dengan diversifikasi produk ekspor.

"Negara-negara pengeksport sekarang sedang membidik pasar alternatif yang sama. Jadi, strategi ini mesti dibarengi dengan diversifikasi produk," ujar Fadhil.

Diversifikasi perlu diarahkan pada peningkatan proses nilai tambah. "Produk olahan tidak terkena dampak krisis sehebat komoditas primer atau setengah jadi," tutur Fadhil.

Harga produk olahan yang langsung ditujukan untuk konsumen akhir umumnya tidak sefluktuatif bahan baku, atau barang setengah jadi. Selain itu, proses nilai tambah diandalkan untuk menyerap tenaga kerja.

Namun, Fadhil mengingatkan, diversifikasi pasar dan produk membutuhkan dukungan pemerintah, antara lain terkait pembiayaan ekspor.

Tingkat risiko yang relatif tinggi dan keterbatasan instrumen pembayaran membuat perbankan menahan diri dalam mendukung perluasan ekspor ke pasar baru. (Kompas)

4. INVESTASI SUMSEL: 7 Investor China Berminat Bangun Pabrik Etanol

Krisis ekonomi global seolah tak berpengaruh pada Negeri Tirai Bambu, setelah melirik untuk investasi pada mega proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api, kini sebanyak 7 investor dari China juga berminat membangun pabrik etanol dan alkohol di Sumatera Selatan (Sumsel). Dua di antaranya adalah Beijing Goldenway Bio-Tech Co Ltd dan LinZe JingYu Ethylm Alcohol Co Ltd.

"Investor China yang mau bangun pabrik etanol dan alkohol sudah datang dan mereka meminta agar Pemprov Sumatera Selatan menyediakan lokasi yang layak. Mereka tampaknya serius," kata Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin usai pertemuan dengan tujuh pengusaha asal China tersebut di Jakarta, Minggu (30/11). Pertemuan para pengusaha China dengan Gubernur Sumatera Selatan tersebut atas prakarsa dan undangan dari Ketua Hipmi Sumsel Dodi Reza Alex. Dalam pertemuan itu, sudah ada 7 pengusaha China yang menyatakan minatnya.

Menurut Alex, Pemprov Sumsel tentu akan memberikan kemudahan bagi investor swasta dan asing yang menanamkan modalnya di daerahnya. "Saya melihat mereka serius mau bangun pabrik etanol dari bahan baku jagung dan alkohol dari bahan baku singkong," tuturnya.

Lebih jauh Alex menjelaskan, pabrik etanol dan alkohol akan berdampak untuk menggerakkan ekonomi di perdesaan. Ini karena para petani jagung dan singkong bisa memasarkan hasil pertaniannya ke pabrik tersebut.

"Saya belum mengetahui berapa besar nilai investasi yang akan ditanamkan. Karena dalam waktu dekat, para pengusaha China tersebut akan melakukan kunjungan ke Sumsel, khususnya untuk mencari lokasi yang bagus untuk pabrik, lahan jagung serta singkong," katanya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumsel Dodi Reza Alex mengungkapkan, alasan mengundang investor China tersebut, karena memiliki teknologi yang tepat guna dalam mengolah bahan baku lokal menjadi bio energi, baik etanol maupun alkohol.

"Pengusaha China ini sangat jeli dalam mengolah etanol dan alkohol sebagai salah satu energi alternatif," tuturnya.

Dia menambahkan, pertemuan antara Pemprov Sumsel dan investor China sangat penting, karena komitmen investasi bukan hanya sebatas peninjauan. Bahkan juga terbuka kemungkinan untuk investasi di bidang lainnya. "Terkait imbas krisis, sebaiknya memang kita lebih banyak menggunakan bahan-baku lokal, sehingga bisa juga berdampak menggerakkan ekonomi di perdesaan," ujarnya.

Sedangkan Prof Yuri Thamrin, sebagai mediator dan fasilitator yang menjembatani pengusaha China dan Pemprov Sumsel mengatakan, sedikitnya ada 3 investor China yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Selatan.

"Investor-investor antara lain akan bergerak di bidang teknologi, agribisnis, dan pupuk. Masih banyak potensi sumber daya alam di Sumsel yang belum dioptimalkan," katanya. (Suara Karya)

C. SOSBUD

1. Hak Cipta dan Paten Budaya Diatur dalam UU Baru

Penerapan hak cipta dan paten dalam perlindungan pengetahuan budaya dan ekspresi budaya tradisional akan diatur dalam UU baru yang sekarang sedang dibahas rancangannya di bawah Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan HAM.

Prof Dr Edi Sedyawati, anggota pokja RUU Perlindungan Pengetahuan Budaya dan Ekspresi Budaya Tradisional mengatakan, dalam RUU akan diatur perbedaan hak cipta dan hak paten serta institusi yang berhak mengklaim sebagai pemilikinya di Nusa Dua, Selasa (2/12).

"RUU ini sedang dibahas dan kita ingin bisa diberlakukan 2010," kata Edi Sedyawati, mantan Dirjen Kebudayaan Depdikbud sebelum pembukaan konferensi internasional yang diselenggarakan Organisasi Hak atas kekayaan intelektual dunia (WIPO) di Nusa Dua, Bali, 2-3 Desember 2008.

Pembedaan hak cipta dan paten perlu disebarluaskan, sehingga tidak ada salah tanggapan atas masalah budaya tradisional, seperti kasus batik yang katanya diklaim milik Malaysia.

Hak cipta, katanya, berkenaan dengan kepemilikan karya cipta atau "copy right" atas sesuatu, sedang hak paten bisa dilakukan akibat adanya inovasi teknologi terhadap suatu karya cipta.

Ia menjelaskan, dalam kasus batik, hak cipta memang milik budaya tradisional bangsa Indonesia, namun untuk hak paten, bisa jadi Malaysia berhak mengklaim karena mereka bisa membuktikan terjadinya inovasi baru dalam teknologi membuat batik yang khas, seperti dengan kuas atau teknik baru lain dari punya Indonesia dengan teknik canting dan cetak (printing).

Ia juga menjelaskan, dalam UU nantinya, yang berhak mengklaim pemilik budaya tradisional adalah dewan adat. Namun bila tidak ada dewan adat, yang berhak mengklaim pemiliknya adalah instansi atau pemerintah daerah yang menaunginya, atau bila tersebar di berbagai provinsi yang mengklaim tentunya pemerintah pusat.

"Dengan adanya kepemilikan hak cipta atau paten ini penting bagi perolehan pendapatan yang diatur sebagai 'profit sharing' (bagi hasil) bagi pemilik budaya tradisional itu," katanya.

Ia mengatakan, bagi pemerintah daerah, pendapatan dari hak cipta atau paten bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). (Republika Online)

D. HANKAM

:

1. KEAMANAN LAUT: Pembajakan Tidak Bakal Terjadi di Selat Malaka

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, maraknya pembajakan dan perompakan yang terjadi di kawasan perairan Somalia tidak akan terjadi atau sampai menginspirasi peristiwa serupa di kawasan perairan Selat Malaka.

Penilaian itu disampaikan Tedjo saat menerima Kompas di kediamannya, Jakarta Pusat, Minggu (30/11) malam. Menurut dia, berbagai kekacauan di perairan Somalia terjadi dan didukung oleh kekacauan yang juga dihadapi negara itu.

"Jaminan dari negara itu terhadap keamanan kawasan perairannya sudah tak bisa diharapkan. Masalah keamanan dan penegakan hukum di negara itu sudah tidak ada lagi sehingga kemudian berdampak pada keamanan wilayah lautnya," ujar Tedjo.

Menurut dia, pilihan membajak dan merompak diambil para pemberontak di sana karena dianggap menguntungkan dan bisa membiayai aksi pemberontakan mereka.

Selat Malaka adalah perairan tersibuk dan terpenting di dunia. Saat ini sebanyak 38 persen dari total perdagangan dunia diangkut dengan kapal laut melalui perairan tersebut.

Sejumlah negara berpengaruh, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, juga mengantungkan pasokan energi mereka dari kawasan Timur Tengah yang dibawa melewati kawasan Selat Malaka. Saat ini ada empat negara pantai yang terlibat dalam upaya pengamanan kawasan Selat Malaka. Keempat negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

"Sejak tahun 2005 kejahatan di Selat Malaka diakui jauh menurun, sesuai dengan pengakuan International Maritime Organization (IMO) yang bermarkas di Inggris dan International Maritime Bureau (IMB) yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia," ujar Tedjo.

Tidak hanya itu, kasus-kasus yang terjadi di kawasan Selat Malaka belum sampai pada tahap pembajakan (piracy), melainkan masih sebatas perompakan (robbery), yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil pelaku kriminal. (Kompas)

E. HUKUM

:

1. Pemerintah Ajukan Arbitrase NNT

Pemerintah Indonesia bertekad mengajukan arbitrase terhadap PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke pengadilan internasional.

Itu terkait dengan gadai saham yang telah dilakukan NNT beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan menegaskan, selama saham Newmont masih tergadaikan, pihaknya akan terus berusaha menyelesaikan masalah tersebut. "Pemerintah berharap Maret atau April selesai, tapi jika masih digadai (sahamnya) akan sulit rasanya bagi pemerintah untuk mencari jalan keluar selain di

persidangan,"kata dia di Jakarta kemarin. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan arbitrase pertama pekan depan atau pada 8 Desember 2009.

Dia juga mengungkapkan, sebelumnya untuk menggugurkan kewajiban divestasi sahamnya sebesar 10%,Newmont pernah menawarkan saham yang sedang digadaikan ke perbankan kepada pemerintah. Bahkan, Newmont juga menawarkan dividen itu kepada pemerintah, tetapi ditolaknya. (Koran Sindo)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. HTI, Masa Depan Sektor Kehutanan

Masa depan sektor kehutanan Indonesia ada pada pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Kebutuhan dunia akan kayu sebagai bahan baku kertas akan makin meningkat. Mantan Menteri Kehutanan era 1988-1993, Hasjrul Harahap menyampaikan hal itu pada acara Peluncuran Buku Hasjrul Harahap Dari Mandor Jadi Menteri, Sabtu (29/11).

"Saya optimistis masa depan kehutanan Indonesia tetap prospektif. Hanya, memang ada masa turun dan masa naik. Sekarang sedang turun sedikit. Dan yang membuat ekonomi kita anjlok itu AS (Amerika Serikat-red), dan krisis ini paling cepat dua tahun ke depan baru akan pulih," ujarnya.

Menurut Hasjrul, HTI harus ditanami jenis tanaman kayu yang memiliki pertumbuhan cepat. Kesulitan bahan baku yang saat ini terjadi pada industri kehutanan, tegasnya, karena perusahaan HTI belum merealisasikan penanaman yang telah disepakati sebelumnya. "Dahulu kalau perusahaan bisa mengelola konsesi HTI-nya maka Departemen Kehutanan (Dephut) akan memberikan areal pengelolaan HTI yang lebih luas lagi, tetapi kalau untuk pertukangan maka akan diberikan lebih kecil," jelas Hasjrul.

Pada masa dirinya menjadi menteri kehutanan, katanya, luasan HTI untuk pertukangan hanya 10.000-20.000 hektare, namun untuk penanaman HTI 150.000-200.000 hektare.

Di samping itu, sambung Hasjrul, perusahaan pemegang konsesi HTI diberikan waktu selama 25 tahun untuk melakukan penanaman dengan mengurangi penebangan hutan alam. "Sekarang kayu tanaman industri seperti sengon bisa dipakai untuk kayu lapis (plywood) dan kayu bangunan untuk industri kertas," saran Hasjrul.

Ia menambahkan untuk mengurangi laju kerusakan hutan (deforestasi) harus tetap melaksanakan program tebang tanam, di mana pihak yang menebang diwajibkan untuk menanam dalam jumlah tertentu dan luasan tertentu. "Dulu laju kerusakan hutan satu juta per hektare, sekarang menjadi dua juta per hektare. Padang alang-alang masih banyak dan bisa ditanami. Jangan tebang saja, tetapi tanamnya mudah-mudahan," tandasnya. (Sinar Harapan)

2. Kehidupan Laut, Ditemukan, 5 Spesies Ikan Baru di Nusa Penida

Para ahli dari Conservation International Indonesia menemukan lima spesies ikan baru di perairan sekitar Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Kelima spesies itu adalah Chromis sp, Priolepis 33 sp, Priolepis 11 sp, Pseudochromis sp, dan Trimma sp. Penemuan ini memperkaya sekitar 550 spesies ikan karang yang telah teridentifikasi sebelumnya, termasuk spesies campuran dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Direktur Marine Program Conservation International Indonesia Ketut Sarjana Putra mengatakan, pihaknya yakin kelima ikan itu termasuk spesies baru. Namun, pihaknya tetap menghubungi museum internasional dan beberapa organisasi internasional untuk memastikan.

"Kami berharap pemerintah daerah menjaga dan mengajak masyarakat untuk memelihara perairan di sekitar Nusa Penida, apalagi potensinya sangat besar untuk biota kelautan," kata Ketut di Denpasar, Senin (1/12).

Chromis sp yang ditemukan memiliki warna oranye dengan ekor putih, panjang sekitar 12 cm, dan berasal dari famili demsel. Ikan tersebut pemakan plankton dan hidup secara berkelompok di kedalaman 20-50 meter.

Tiga jenis ikan lain, Priolepis 33 sp, Priolepis 11 sp, dan Trimma sp, masuk kelompok gobi dengan ukuran sekitar 3,5 cm. Ikan ini hidup di kedalaman mulai dari 50 meter. Ikan Pseudochromis sp termasuk dalam famili dotyback. Habitatnya di perairan arus kuat kedalaman

25-60 meter. Warna badannya coklat kemerahan serta ada garis kuning dan biru di bawah kelopak mata.

Temuan itu dihasilkan dari penelitian Nusa Penida Marine Rapid Assessment Program selama 10 hari, 20-30 November. Penelitian melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, SEACORM, Yayasan Bahtera Nusantara, Universitas Udayana, dan Universitas Warmadewa.

Gerry Allen yang dikenal sebagai ahli ikan kelas dunia juga terlibat dalam penelitian itu. Rapid menyimpulkan, 60 persen terumbu karang Nusa Penida masih tumbuh dengan baik. Saat ini tercatat ada 260 spesies dari 800 spesies di dunia. (Kompas)

III. ARTIKEL :

1. Ancaman Obama untuk Indonesia (Oleh Saidiman)

Pemerintah Indonesia patut mewaspadaai Barack Obama yang berhasil memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat, 4 November 2008. Kewaspadaan itu perlu mengingat perbedaan yang mungkin muncul antara cita-cita politik Obama dan haluan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Memang banyak warga negara Indonesia yang menginginkan senator ini memenangkan pemilihan. Para pendukungnya menganggap Obama akan menjadi presiden yang memerhatikan kepentingan Indonesia dalam politik internasional. Pengalaman pernah tinggal di Indonesia diyakini akan membuka mata Obama tentang realitas masyarakat dunia yang beragam.

Dengan pemahaman seperti itu, Obama tampil sebagai kandidat yang mengusung nilai-nilai liberalisme dan pluralisme. Dalam pidato kemenangannya, Obama tidak segan menyapa semua warga Amerika: yang berkulit putih maupun hitam, yang perempuan maupun laki-laki, para agamawan, kaum gay maupun lesbian, para difable, dan seterusnya. "Kita semua adalah warga Amerika Serikat," tegasnya.

Dengan cara pandang semacam ini, tampak bahwa Obama tidak akan memberi toleransi terhadap praktik-praktik diskriminasi dalam bentuk dan dengan latar belakang apa pun. Dia tidak akan mudah melakukan praktik yang sebetulnya selalu menjadi ancaman bagi eksistensinya sebagai kelompok minoritas kulit hitam Amerika. Latar belakang semacam ini penting untuk membangun kesadaran mengenai pluralitas.

Yang membedakan pemerintahan Bush dan Obama adalah bahwa Bush menerapkan cara pandang dualisme: di mana dunia di luar Amerika dianggap sebagai objek yang harus diubah sesuai dengan cara pandang masyarakat Amerika. Dunia ini, bagi Bush, harus di-"adab"-kan, apa pun caranya, dan itu adalah sesuatu yang baik.

Paradigma Diskriminatif Pemerintah Indonesia

Latar belakang Obama sebagai minoritas akan membuatnya lebih bisa menyadari akan adanya keragaman. Masing-masing orang memiliki nalar dan kebajikannya sendiri. Nilai kebenaran tidak pernah tunggal, melainkan beragam. Obama akan lebih mudah merayakan keberagaman, ketimbang mencurigainya. Inilah keistimewaan kalangan minoritas yang berhasil menjadi pemimpin.

Terlalu dini jika kemudian kita simpulkan bahwa dengan bekal pengetahuan mengenai realitas Indonesia, Obama kemudian akan mengeluarkan kebijakan yang mendukung kebijakan pemerintah negeri ini.

Pemerintah Indonesia justru seharusnya waspada kepada Obama mengingat beberapa kebijakan dalam negeri yang belum sesuai dengan garis haluan cita-cita Obama untuk menghapus diskriminasi.

Dalam banyak kasus, Indonesia terlihat belum cukup memuaskan dalam penanganan isu-isu penghapusan diskriminasi. Beberapa kasus besar pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan rezim pemerintah masih terlalu jauh dari penyelesaian: kasus pembantaian anggota PKI 1960-an, represi Orde Baru terhadap kelompok Islam, kekerasan Timor Timur, pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, penculikan dan pembunuhan aktivis di akhir 1990-an, pembunuhan aktivis HAM Munir, kekerasan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah, pemenjaraan dan kekerasan terhadap tokoh-tokoh agama minoritas seperti Lia Eden, Yusman Roy, Madi, dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia tidak hanya lalai dalam menjamin hak warga negara minoritas untuk hidup dan berekspresi sebagaimana warga negara pada umumnya, pemerintah bahkan tidak

mampu membendung semangat untuk memberlakukan pelbagai aturan diskriminatif. Pelbagai peraturan daerah silih berganti muncul untuk membatasi aktivitas warga. Tiga pembantu presiden bahkan menandatangani larangan terhadap penganut ajaran Ahmadiyah untuk menyebarkan keyakinannya. Pemerintah tampak masih sangat tunduk kepada aspirasi kelompok mayoritas, tetapi mengabaikan hak-hak minoritas. Dewan Perwakilan Rakyat bahkan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pornografi yang mendiskreditkan budaya beberapa kelompok masyarakat.

Keragaman adalah Esensi Kehidupan

Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan pembiaran terhadap praktik-praktik diskriminasi, melainkan juga acapkali terlibat sebagai pelaku diskriminasi itu sendiri. Menangkap orang-orang yang dianggap menyimpang dalam hal keyakinan agama benar-benar adalah bentuk diskriminasi.

Paradigma menyimpang hanya berdasar kepada pendapat kelompok mayoritas. Sementara argumentasi dan aspirasi kelompok minoritas tidak mendapat perhatian sama sekali. Dari kacamata minoritas, yang menyimpang justru adalah kelompok mayoritas.

Pada aspek pembangunan, pemerintah Indonesia jelas melakukan diskriminasi pembangunan. Pemerintah seolah tertutup pintu hatinya untuk memfokuskan pembangunan pada masyarakat Indonesia bagian Timur yang sejak lama tidak bisa menikmati akses pembangunan. Masyarakat Indonesia bagian Timur dibiarkan tenggelam dalam keterbelakangan dan kebodohan. Akibatnya, seluruh paradigma berpikir pemerintah selalu terpaku pada cara pandang masyarakat Indonesia bagian Barat.

Pelbagai kasus diskriminasi ini terjadi karena tidak adanya kesadaran mengenai keragaman. Seolah-olah dunia ini adalah satu dan seragam. Keragaman adalah sesuatu yang benar-benar nyata dan tak mungkin dipungkiri. Adonis, pemikir besar Lebanon, mengemukakan bahwa asal muasal keragaman itu ada pada penciptaan awal.

Tidak benar, menurut Adonis, penciptaan ini berasal dari sesuatu yang tunggal. Fakta keragaman membuktikan bahwa semuanya berasal dari yang beragam. Keragaman adalah esensi kehidupan. Oleh karenanya, menghargai dan merayakan keragaman adalah sesuatu yang semestinya. Mereka yang ingin memberangus keragaman justru adalah mereka yang ingin keluar dari logika alamiah itu sendiri.

Paradigma diskriminatif itu pasti bertolak belakang dengan paradigma yang terus-menerus dijadikan bahan utama bagi kampanye Obama. Dengan demikian, jika pemerintah Indonesia tidak mau mengubah paradigma diskriminatifnya, maka bukan simpati Obama yang akan datang, melainkan ancaman. Selamat datang, Obama. (Sinar Harapan)

2. Perubahan Iklim dan Absennya Kepemimpinan (oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMI)

Poznan adalah sebuah langkah krusial. Di tengah krisis ekonomi dunia, sekali keliru melangkah di sana, dunia akan tenggelam dalam bencana lingkungan dan krisis ekonomi berkepanjangan seakan tak berujung.

Negara maju pengutang jasa lingkungan adalah negara-negara yang juga mengalami krisis ekonomi cukup parah. Di sisi lain, merekalah yang pertama dituntut membayar semua utang lingkungan dengan kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) rata-rata 5 persen dari level GRK tahun 1990. Mampukah mereka? Pertanyaan ini kencang bergaung di Poznan.

Jurang menganga

Semakin menghilangnya batas antarnegara dengan semakin terbukanya komunikasi di satu sisi telah membentuk suatu desa global "tak berbatas".

Organisasi-organisasi global didirikan untuk mengatur lalu lintas kepentingan negara-negara di dunia. Di sanalah pertama-tama terjadi ketidakadilan: ketidakadilan sosial, ketidakadilan lingkungan, dan sebagainya. Berbagai ketidakadilan itu berbasis pada absennya kesetaraan (equity).

Pengaturan dunia menjadi hak segelintir bangsa kaya—AS sendiri menguasai sekitar 40 persen kapital dunia. Alih-alih menjadi pemimpin dunia yang mengindahkan hak-hak seluruh warga dunia, negara-negara kuat ini justru memeras negara-negara berkembang sebagai penopang kemakmurannya.

Dalam isu perubahan iklim, pemilik alat serap karbon (carbon sink) adalah negara-negara pemilik hutan tropis. Tahun lalu Indonesia menjadi pelopor membentuk F-11, yaitu kelompok negara-negara pemilik hutan tropis di antaranya Brasil, Kamerun, Kolombia, Gabon, Kongo,

Republik Demokratik Kongo, Meksiko, Papua Niugini, dan Peru. Apa hasilnya? Nyaris tidak terdengar.

Ketika meja konferensi di Poznan diketok kemarin, Senin 1 Desember 2008, secara bersamaan terdengar kabar bahwa pada Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam akan kembali dicantumkan soal kontrak karya yang semula tak akan ada. Ini berarti perusakan hutan secara masif akan terjadi bertahun-tahun lagi. Ini berarti bertambahnya deretan kesimpangsiuran paradigma Pemerintah Indonesia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya-setelah terbitnya PP No 2/2008.

Apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang terjadi di dunia, setali tiga uang. Serba tidak sinkron. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan komitmen Indonesia untuk bersama-sama negara lain melakukan penanggulangan dampak perubahan iklim, maka yang terjadi adalah: angka penjualan mobil tahun 2008 hingga bulan ini justru meningkat sekitar 20 persen (baca: emisi gas rumah kaca semakin tinggi).

Apa yang sebenarnya terjadi?

Situasi ini dikupas tajam oleh Thomas L Friedman dalam buku terbarunya *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need A Green Revolution-and How It Can Renew America*. Di sana dia menyatakan, saat ini adalah saat tepat bagi AS untuk berkiprah lebih besar sebagai pelopor untuk atasi krisis global.

Mari kita baca dengan kaca mata lebih luas. Friedman secara tidak langsung menyitir betapa dunia butuh pemimpin. Sejalan dengan ini tercantum dalam buku *Plan B* (Lester R Brown) yang menyatakan hal serupa. Perang terhadap perubahan iklim dikatakan sebagai wartime—seperti layaknya Perang Dunia II—di mana ketika itu juga ada negara yang memimpin.

Kini banyak pihak mengincar Barack Obama untuk memimpin dunia dalam perang menghadapi perubahan iklim. Siakah dia? Betulkah dia orang yang tepat? Itu perlu perdebatan panjang.

Lalu, kita di Indonesia? Kita juga butuh pemimpin untuk membawa kita berperang menanggulangi dampak perubahan iklim. Dan, kesempatan kita ada di depan mata: Pemilu 2009. (Kompas)

3. Indonesia needs to step up to the plate (by Bara Hasibuan)

As the ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Summit -- initially to be held in Bangkok in mid-December with the adoption of the ASEAN Charter on top of the agenda -- is likely to be postponed due to the continuing political unrest in Thailand, it would be worthwhile for the organization's leaders to rethink the Charter itself.

It is true that for many in the region the Charter is a milestone. For the first time in its 41-year existence, ASEAN has a constitution which can potentially lead it to be "a rule-based and people-oriented" entity.

It even indeed sets out rules for the ASEAN members and gives the organization legal personality. More importantly, it enshrines the principles of "respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights and the promotion of social justice". It also calls for the establishment of a human rights body to ensure that every member state adheres to the Charter's principles.

But, unfortunately the Charter fails to include a provision which would authorize sanctions for any member that does not comply with its rules and principles. And it remains unclear how much power will be granted to the human rights body in enforcing the principles. To make matters even more ambiguous, the Charter validates a long-held ASEAN principle that is the root cause of the organization's ineptitude in dealing firmly with its members -- "non-interference in the internal affairs of ASEAN member states".

This unmistakably means that its adoption will not resolve one major problem that has constantly haunted ASEAN members over the years: How to deal with a fellow member country -- Myanmar -- whose regime continues to act in wanton defiance of basic principles of human rights.

In fact, in the long run the Charter potentially poses a whole set of problems for ASEAN. For instance, it will be an embarrassment for an organization that includes human rights principles in its most sacred document but at the same time has a member in absolute violation of those principles. And it will be more embarrassing if the organization is unable to sanction that particular member for its behavior.

There is no indication that Myanmar's junta has any intention to change its course in the near future and restore democracy. In fact, when the regime was in the process of ratifying the Charter

earlier this year it was carrying on with its repression by rounding up political activists and sending them to jail without due process.

Without any serious effort to make amendments to it, the Charter will fail to make ASEAN a more credible and effective grouping, not just in dealing with a host of internal issues but also in shaping the emerging East Asian architecture along with the three major powers of China, India and Japan. Jusuf Wanandi of CSIS Jakarta (*The Jakarta Post*, Nov. 3, 2008) argues that an effective cooperation to maintain peace, stability and economic dynamism in the East Asian region would also have to get the United States on board.

But Myanmar has always been the sticking point in U.S.-ASEAN relations. If ASEAN continues to fail to deal with Myanmar effectively then U.S.-ASEAN relations may not move to the next level in the new Obama administration -- which is supported by a Democratic Congress. And as Secretary of State, Hillary Clinton might have unabashed empathy toward Aung San Suu Kyi which could influence her stance on ASEAN.

Indonesian Foreign Minister Hassan Wirajuda has conceded that the Charter is "not a perfect document" and that it is "always open to amendment". One thing that can be done immediately, while waiting for the right moment to initiate amendments to the Charter, is to make sure that the Human Rights Commission will have enough power to enforce the Charter's rules and principles, including providing recommendations for sanction or expulsion.

What the Indonesian House of Representatives did by inserting an addendum to the Charter ratification law which stipulates that the Charter has to reflect the "ideals of ASEAN" -- including the improvement and protection of human rights through an effective ASEAN human rights body, the institution of sanctions, including freezing of membership in cases of serious noncompliance and obstruction of the charter by members -- was undoubtedly laudable. But that was not enough.

The Indonesian government needs to step up to the plate and provide strong leadership, without which it will be virtually impossible for ASEAN to produce a human rights body that is equipped with sufficient power to be effective.

Indonesia is ASEAN's indispensable power, not just as the largest member country but also as the freest and most stable democracy. And with such power comes responsibility. Indonesia should use its influence to spread -- and should not be ashamed to do so -- democratic virtues throughout ASEAN and more importantly, to convince fellow members to break away from the so-called "constructive engagement" principle which has time and time again proved to be absolutely ineffectual in dealing with the unsavory junta in Myanmar.

The geopolitical considerations -- mainly to prevent China and India from exerting its influence in Myanmar -- that drove ASEAN to admit Myanmar in 1997 do not hold up anymore. China -- and to a certain extent, India -- have been dominant powers in Myanmar anyway.

Standing up to Myanmar, or even expelling it from ASEAN, would not change the equation. True, a number of ASEAN members have commercial interests in Myanmar which oftentimes make it difficult to push the Association to take a hard-nosed stance on Myanmar. But that doesn't mean Indonesia has to go with the flow all the time.

When Myanmar was admitted into ASEAN 1997, Indonesia was still under the authoritarian rule of Soeharto. Since it is now a country that proudly calls itself the world's third largest democracy its continued silence on its neighbor, Myanmar, is utterly unacceptable. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. **KTT ASEAN Terpaksa Ditunda**

Putusan penundaan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Thailand semakin memperlihatkan pergolakan politik di negeri itu cenderung memburuk.

Semula KTT direncanakan dilaksanakan 15-16 Desember mendatang di Chiang Mai, tetapi terpaksa ditunda menjadi bulan Maret 2009 karena situasi tidak mendukung oleh gelombang protes yang tidak kunjung surut sejak bulan Agustus lalu.

Proses persiapan KTT memang terganggu karena pergolakan politik yang terus meningkat. Bahkan, selama satu pekan terakhir, Bandara Don Muang, Bangkok, praktis lumpuh karena dikepung kaum demonstran.

Penundaan KTT mengakibatkan pula penangguhan pelaksanaan Piagam ASEAN, yang tuntas diratifikasi seluruh 10 negara anggota bulan November lalu. Semula piagam yang disepakati para pemimpin ASEAN dalam KTT di Singapura, November 2007, itu akan mulai dilaksanakan tanggal 15 Desember mendatang.

Pelaksanaan piagam penting karena akan memberi basis hukum untuk mendorong integrasi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, demokrasi, perlindungan hak asasi, dan pelestarian lingkungan. Dengan piagam itu, keberadaan ASEAN sebagai organisasi regional diharapkan semakin solid.

Sejak didirikan tahun 1967, ASEAN hanya bersifat peguyuban meski telah menghasilkan "semangat ASEAN". Penundaan pelaksanaan Piagam ASEAN tentu saja menimbulkan keprihatinan tersendiri, tetapi lebih memprihatinkan lagi kondisi politik Thailand yang cenderung memburuk.

Gelombang protes yang berlangsung sejak bulan Agustus lalu di Thailand telah mengancam proses demokratisasi. Kelompok penentang pemerintah, yang kalah dalam pemilu, telah menggunakan protes sebagai cara merebut kepentingan politik dan kekuasaan.

Pemilu terkesan tidak digunakan lagi sebagai medium efektif menjalankan proses demokratisasi, tetapi penggunaan protes di jalanan. Metode ini merupakan ancaman berat bagi masa depan demokrasi Thailand.

Sangatlah dikhawatirkan, kelompok yang tidak menyukai pemerintah akan memaksa kehendak dengan merekayasa gelombang protes untuk menjatuhkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

Jika pola dan metode ini dibiarkan, bukan hanya kehidupan demokrasi tidak akan berkembang, tetapi juga kekacauan politik tidak akan terus berlangsung, yang memberi komplikasi negatif bagi aspek kehidupan bangsa dan negara Thailand secara keseluruhan. Secara regional, kekacauan politik di Thailand juga memberikan pengaruh negatif bagi stabilitas kawasan. (Kompas)

2. Sour tasting 'tom yam'

The constitutional mess that Thailand has today is what happens when you mix the wrong ingredients into tom yam soup. Instead of hot and spicy the way it ought to be, you end up with a sour tasting soup.

Thai democracy is as good as dead, thanks to a poor mixture of military and monarchy interventions these past two years.

Breaking from the current impasse unfortunately will likely require some draconian measures. Like it or not, another military intervention is probably needed to end the week-long occupation of Suvarnabhumi Airport, Bangkok's newest state-of-the-art airport. It is no longer a question of if -- it is really a question of when the military will step in.

As it is, thousands of foreigners are stranded and cannot leave the country, while many Thais abroad cannot return to their homes because of the airport's closure. The Thai economy, already hurt by the global financial crisis, will unnecessarily have to endure even more blows, particularly from the tourism sector.

Thailand was once regarded as a showpiece of democracy in Southeast Asia. Many Indonesians went to study the Thai experience when we embarked on our own path toward democracy after the collapse of the Soeharto regime in 1998. Today, Thailand is no longer a role model of democracy in this part of the world -- although it still makes a good case study of what not to do in a democracy.

The chief lesson -- or the biggest mistake that well-meaning Thais have committed -- is losing their faith in democracy just because the electoral system in 2001 put someone like Thaksin Shinawatra, a businessman whose democratic credentials are dubious, as prime minister.

No one can dispute that Thaksin won the elections fair and square in 2001 and in 2006. And following the military coup in 2006 and in spite of Thaksin's disbarment from politics, his party won the election again last year, and thus had the right to nominate the prime minister, Somchai Wongsawat, who has ruled as Thaksin's proxy.

Thai democracy was effectively killed in 2006 when the military, with the consent if not the encouragement of the monarchy, grabbed power from Thaksin in a move that was widely applauded even by the most democratic elements in Bangkok's political elite.

Frustrated by their repeated losses at the ballot boxes against Thaksin who had widespread support in rural Thailand, the Bangkok elite launched demonstration after demonstration against Thaksin's rule that crippled the government, and thus opened the door for military intervention.

The main lesson of Thai's experience with one military junta after another in the 1970s and 1980s was obviously long forgotten, that once you tolerate a coup, you will never see the end of it. Another valuable lesson is that when you tinker with democracy, it can spell the end of it -- and possibly many of its associated freedoms.

No one ever said that democracy was perfect. Many times we have seen the wrong kind of leaders elected to govern. But we also know that democracy has a built-in, self-correcting mechanism, so even if you have elected the wrong leader this time, you should be able to replace that leader the next time around -- if you work hard enough.

If you don't have faith in democracy just because it did not give you the desired results, then you may as well forget it. In democracy, you win some, you lose some. That's the way it always works. Part of the democratic culture is also in accepting defeat at the ballot gracefully.

The Bangkok political elite seem unable or unwilling to give democracy a chance to work and are prepared to disrupt their own country and their economy in order to have things their way. That seems an undemocratic attitude in itself.

The military option, one that at least offers greater stability, is looking more and more attractive for many Thais.

The tom yam soup may not be as hot and spicy as we like it, but at least it's warm. (The Jakarta Post)

Jakarta, 2 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu